

## **ABSTRAK**

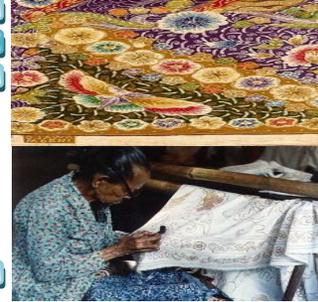
*Tujuan studi ini adalah untuk membuat dokumen tentang identifikasi potensi dan masalah serta konsep dan strategi pengembangan sektor unggulan perekonomian yang dapat digunakan sebagai referensi dan acuan bagi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengembangkan perekonomian di Kota Pekalongan.*

*Teknik analisis data primer yang bersifat kualitatif dan hasil wawancara mendalam dan FGD dilakukan secara deskriptif - kualitatif. Melalui cara tersebut diharapkan dapat diperoleh hasil yang bersifat komprehensif. Sedangkan untuk data kuantitatif diolah dengan analisis dekriptif, yaitu analisis tabel frekuensi, analisis persentase. Untuk menggambarkan adanya kecenderungan dilakukan dengan membentuk diagram dan grafik.*

*Hasil studi ini diharapkan memberikan informasi/penjelasan mengenai sektor unggulan yang mendapatkan prioritas untuk dikembangkan di Kota Pekalongan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing produk. Kemudian memberikan informasi tentang sektor perekonomian yang saat ini belum menjadi unggulan di Kota Pekalongan, tetapi memiliki potensi untuk menjadi unggul di masa datang apabila mendapatkan perlakuan atau kebijakan tertentu. Dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Daerah Kota Pekalongan dalam rangka pengembangan sektor unggulan perekonomian.*

*Kata kunci : Produk unggulan, strategi pengembangan*

# BAB I PENDAHULUAN



## 1.1. LATAR BELAKANG.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor, 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTWN), Kota Pekalongan ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) pulau Jawa dan sesuai dengan Perda No. 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah dengan kedudukan Kota Pekalongan berfungsi sebagai wilayah Petanglong (Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang). Kota Pekalongan diharapkan dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan wilayah Propinsi Jawa Tengah dan berkontribusi dalam pengembangan wilayah nasional.

Sesuai dengan dokumen Masterplan Percepatan dan perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) bahwa pembangunan infrastruktur di koridor Ekonomi Jawa, diharapkan mampu memperkuat posisi Koridor Ekonomi Jawa sebagai “ Pusat Pengembangan Industri dan Jasa nasional”. Hal ini sesuai dengan kebijakan dan arahan pengembangan kota Pekalongan yang dilihat dari PDRB bahwa Kota Pekalongan berkembang menjadi Kota perdagangan, jasa serta industri kreatif.

Sebagai pusat kegiatan regional, Kota Pekalongan memiliki berbagai dan infrastruktur tingkat regional yang cukup lengkap seperti fasilitas terminal bus kelas A, pelabuhan perikanan, industri, pergudangan, rekreasi, jasa, perdagangan, dan sebagainya. Kelengkapan fasilitas perkotaan tersebut serta fungsi Kota Pekalongan sebagai Pusat kegiatan Wilayah telah mendorong perkembangan kota dengan pesat. Perkembangan tersebut berakibat meningkatnya laju pertumbuhan penduduk baik secara alami maupun karena faktor migrasi atau urbanisasi. Pertumbuhan penduduk telah mendorong pergeseran penggunaan lahan, dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun. Pergeseran juga terjadi pada mata pencaharian penduduk dari sektor primer ke sektor skunder dan tersier.

# BAB 2 GAMBARAN UMUM



## 2.1. Keadaan Geografi

Kota Pekalongan terletak pada posisi yang sangat strategis karena berada di tengah-tengah perlintasan jalur utara Pulau Jawa yang menghubungkan Kota Jakarta di sisi barat dan Surabaya di sisi timur. Dari sisi ekonomi hal ini memungkinkan Kota Pekalongan dapat terus berkembang.

Posisi geografis terletak pada 6°50'42" - 6°55'44" Lintang Selatan dan 109°37'55" - 109°42'19" Bujur Timur dengan luas wilayah 45,25 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,14% luas dari wilayah Jawa Tengah, dimana semuanya merupakan daerah datar, tidak ada daerah dengan kemiringan yang curam, terdiri dari tanah kering 67,48% Ha dan tanah sawah 32,53%. Berdasarkan jenis tanahnya, di Kota Pekalongan memiliki jenis tanah yang berwarna agak kelabu dengan jenis aluvial kelabu kekuningan dan aluvial yohidromorf.

Batas wilayah kota Pekalongan adalah laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Pekalongan di sebelah Barat dan Selatan, serta Kabupaten Batang di sebelah Timur dan Selatan. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan 9 km dan dari Barat ke Timur 7 km. Adapun panjang garis pantai Kota Pekalongan adalah 5,8 km yang kesemuanya terletak di Kecamatan Pekalongan Utara.

**Tabel 2.1.**

**Jarak dari Kota Pekalongan ke Beberapa Ibu Kota**

| No. | Kota     | Jarak (km) |
|-----|----------|------------|
| 1   | Semarang | 101        |
| 2   | Jakarta  | 384        |
| 3   | Bandung  | 266        |
| 4   | Surabaya | 488        |

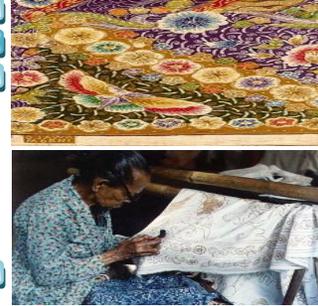
## LAPORAN AKHIR

| No. | Kota       | Jarak (km) |
|-----|------------|------------|
| 5   | Yogyakarta | 219        |
| 6   | Kajen      | 28         |
| 7   | Batang     | 8          |
| 8   | Pemalang   | 35         |
| 9   | Tegal      | 65         |
| 10  | Slawi      | 80         |
| 11  | Brebes     | 78         |

Sumber : Kota Pekalongan Dalam angka (2011)

# BAB 3

## PENDAKATAN DAN METODOLOGI



### 3.1. Pendekatan

#### 3.1.1. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsayad, 1997)

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Yaitu proses yang mencakup pembentukan intuisi-intuisi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

# BAB 4

## IDENTIFIKASI POTENSI EKONOMI KOTA PEKALONGAN



### 4.1. Analisis Struktur Ekonomi

#### 4.1.1. Analisis Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator yang menggambarkan bagaimana suatu perekonomian berkembang dari waktu ke waktu adalah indikator produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB menggambarkan kontribusi berbagai aktivitas sektor dalam perekonomian berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan PDRB sektoral dari waktu ke waktu dapat dilihat dari perkembangan komposisi atau distribusi sektoral dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan. Di samping itu, tumbuh tidaknya suatu perekonomian juga dapat dianalisis dengan mengukur sejauh mana sektor-sektor dalam perekonomian daerah tumbuh, yaitu dengan menghitung pertumbuhan sektoral PDRB.

Memahami kontribusi sektor dalam PDRB akan memberikan informasi tentang komposisi sektor yang memberi andil pada perekonomian daerah. Makin besar presentase suatu sektor, maka makin besar kontribusinya pada ekonomi daerah. Bisa jadi, kontribusi sektor secara nominal meningkat, tetapi menurun secara presentase. Selain itu, komposisi sektor juga menggambarkan apakah terjadi pergeseran kegiatan dalam perekonomian atau tidak.

Nilai PDRB Kota Pekalongan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000 pada tahun 2011 senilai Rp. 2,200,827.79 dan laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,45%, pada tahun 2010 senilai Rp. 2.087.114,17 dan laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,51%, sementara laju pertumbuhan pada tahun 2009 sebesar 4,78 % dengan nilai PDRB Rp. 1.978.085,97. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) Kota Pekalongan dari tahun ke tahun selama 3 tahun terakhir (2008-2010) terus menerus meningkat, seperti terlihat pada gambar berikut ini :



**BAB 5** POSISI PENGEMBANGAN EKONOMI KOTA PEKALONGAN

### 5.1. Kedudukan Kota Pekalongan Dalam Kebijakan Nasional dan Regional

Dalam konteks nasional, Kota Pekalongan mempunyai kedudukan dan peran yang strategis. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), **Kota Pekalongan** ditetapkan sebagai salah satu **Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)**. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan penjabaran detail terhadap kebijakan yang secara hirarkis lebih tinggi yaitu kebijakan nasional dan kebijakan regional. Oleh sebab itu dalam penyusunan RTRW Kota Pekalongan ini harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan di atasnya yaitu kebijakan nasional dan kebijakan regional (Provinsi Jawa Tengah).

Dalam konteks regional, peran Kota Pekalongan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal dan regional. Dalam hal ini Kota Pekalongan harus mampu menjadi pusat pelayanan bagi seluruh wilayahnya. Sebagai pusat kegiatan lokal, maka fungsi Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- Pusat jasa-jasa keuangan yang melayani satu kota.
- Pusat pengolahan/pengumpul barang untuk beberapa kecamatan.
- Simpul transportasi untuk beberapa kecamatan,
- Pusat jasa pemerintahan untuk beberapa kecamatan.
- Bersifat khusus karena mendorong perkembangan sektor strategis atau kegiatan khusus lainnya.

Sementara dalam konteks regional, Kota Pekalongan mempunyai fungsi sebagai Pusat pengolahan/ produk khususnya batik dari berbagai wilayah di Indonesia khususnya Jawa Tengah; Pusat jasa-jasa yang melayani Kabupaten Pekalongan, Batang, dan Pemalang; Menjadi simpul yang menghubungkan kota-kota di Pantai Utara Jawa Tengah

# BAB 6

## STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI KOTA PEKALONGAN



Pengembangan ekonomi lokal (PEL) adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah. Oleh karena itu mendasarkan pada tujuan dan identifikasi produk yang ada di kota Pekalongan, maka strategi pengembangannya adalah sebagai berikut :

### 1. Strategi Pengembangan Berbasis Klaster

Strategi pengembangan produk unggulan berbasis klaster secara garis besar mencakup aspek peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM), pengembangan kelembagaan, pemberdayaan aspek pemasaran dan pengembangan teknologi tepat guna dan pembangunan citra spesifik daerah.

- Pengembangan Kelembagaan

Kelembagaan di sini dalam arti institusi atau wadah, baik formal maupun non formal yang dapat dimanfaatkan oleh produsen untuk meningkatkan kegiatan ekonominya. Kelembagaan ini tidak hanya berperan dalam kegiatan perekonomian masyarakat, tetapi juga dalam pengembangan modal sosial masyarakat. Keterlibatan penuh produsen produk unggulan daerah berbasis klaster dalam setiap tahapan proses pengembangan dengan sendirinya akan memperkuat kekompakkan, kemandirian dan hubungan interaksi dengan yang lain, sehingga lambat laun akan tercipta suatu kelembagaan yang akan mengakar dan memiliki posisi tawar yang kuat.

- Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Pemanfaatan teknologi tepat guna di dalam proses produksi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan

## LAPORAN AKHIR

# BAB 7 Penutup



Dengan tersusunnya Rencana Tindak Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) kota Pekalongan ini, nampak bahwa pengembangan ekonomi local menjadi sistematis dan terarah. Tahapan-tahapan rencana aksi menjadin tahunan sesuai dengan skala prioritas.. Dalam implementasinya harus adaptatif dengan konfigurasi sistem pembagian kekuasaan dan kewenangan SKPD Kota Pekalongan.

Komitmen bersama antara pemerintah kota, masyarakat dan dunia usaha kota Pekalongan merupakan kekuatan kolektif, yang senantiasa menjadikan Rencana Tindak Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) sebagai rujukan utama dalam merumuskan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program-program strategis ekonomi lokal sesuai dengan posisi, peran dan kewenangannya. Dan akhirnya ***“Mengelola Organisasi adalah mengelola Knowledge, Knowledge tidak akan bermakna, jika hanya sebagai informasi. Namun Knowledge akan bermakna jika di implemantasikan ”***